

Penguatan Demokratisasi Pada Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Sakaruddin Mandjarreki

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail:

mandjarreki@yahoo.co.id

Abstrak: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama ideologi bangsa yang merupakan manifestasi dari kehidupan yang sejahtera. Fokus utama dari upaya peningkatan kualitas hidup ini terletak pada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya yang jumlahnya terus meningkat. Pemerintah telah merancang kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini memberikan warga kewenangan untuk merencanakan pembangunan secara mandiri, dengan dasar pada prinsip demokrasi atau demokratisasi komunitas. Demokratisasi komunitas bukan hanya sebuah konsep, melainkan juga telah menjadi arus utama dalam wacana pembangunan alternatif. Rencana pembangunan alternatif menggabungkan paradigma perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, dan sumber data melibatkan wawancara serta referensi yang relevan sebagai data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi, penyajian, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi komunitas yang mencakup; aspek kesempatan partisipasi yang sama, transparansi dalam pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin secara inklusif dan representatif, pengakuan terhadap hak asasi manusia, penguatan kapasitas masyarakat, serta keadilan sosial dan ekonomi, terjabarkan secara memadai, meskipun dengan tingkat kinerja yang beragam dalam semua aspek kunci demokratisasi komunitas.

Kata kunci: Pemberdayaan, demokratisasi komunitas

Abstrack: Improving the quality of life of the community is the main goal of the nation's ideology, which is a manifestation of a prosperous life. The main focus of efforts to improve this quality of life lies with the poor and other vulnerable groups whose numbers continue to increase. The government has designed policies to reduce the number of poor people through various community empowerment programs. These community empowerment programs give citizens the authority to plan development independently, based on the principles of democracy or community democratization. Community democratization is not just a concept, it has also become mainstream in alternative development discourse. Alternative development plans combine top-down and bottom-up planning paradigms. This research uses a qualitative approach with phenomenological methods. Research informants were selected using purposive sampling method, and data sources involved interviews and relevant references as primary and secondary data. Data analysis was conducted using the methods of reduction, presentation, and conclusion. The results show that community democratization, which includes equal participation opportunities, transparency in decision-making, inclusive and representative election of leaders, recognition of human rights, strengthening community capacity, and social and economic justice, is adequately addressed, although with varying levels of performance in all key aspects of community democratization.

Keywords: Empowerment, democratization of communities

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi titik pusat dalam mengembangkan alternatif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pemberian kekuatan, pengetahuan, sumber daya, dan kontrol kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam melawan teori-teori pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai model ideal untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat (Kartasmita, 1996). Masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui proses demokratisasi yang kuat maupun dengan memanfaatkan mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, dialog, dan forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Bahua, 2018).

Dalam konteks pembangunan alternatif, Mardikanto dan Soebiato (2020) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melibatkan pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam ekonomi lokal. Ini mencakup penguatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya agar mereka mampu mengelola usaha ekonomi, mengembangkan inisiatif kewirausahaan, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mencakup pelatihan keterampilan, akses ke modal dan kredit, pengembangan jaringan bisnis, serta dukungan teknis dan mentorship.

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat mendukung pengembangan model ekonomi berbasis lokal yang mendorong inklusivitas, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat, seperti pertanian organik, energi terbarukan, pariwisata

berkelanjutan, dan kewirausahaan sosial. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup pembangunan kapasitas untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan.

Urgensi konsep pemberdayaan pada dasarnya berasal dari gagasan untuk menjadikan manusia sebagai subyek aktif dalam kehidupannya sendiri, bukan hanya sebagai objek. Perubahan paradigma pembangunan nasional menuju demokratisasi dan desentralisasi telah memunculkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam seluruh proses dan program pembangunan. Pemberdayaan menjadi krusial ketika berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan.

Istilah pemberdayaan, yang diadaptasi dari empowerment, muncul di Eropa pada abad pertengahan dan terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep ini kemudian memengaruhi perkembangan teori-teori yang muncul belakangan. Ife (2008) dan John (1980) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, mendorong kreativitas mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Di sisi lain, Paul (1987), seperti yang dikutip oleh Prijono dan Pranarka (1996), menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil untuk meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah, sehingga memperbesar pengaruh mereka dalam proses dan hasil pembangunan. Menurut Friedman (1992), pemberdayaan dalam konteks pembangunan alternatif menekankan pentingnya kekuasaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat, berdasarkan pada sumber daya pribadi, partisipasi langsung, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Program PNPM Mandiri Perkotaan

diimplementasikan dengan dasar pada prinsip demokrasi, sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan dari "membangun masyarakat" (top-down planning) menjadi "masyarakat membangun" (bottom-up planning). Program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pada semua tahap pembangunan bertujuan memberikan otonomi kepada masyarakat untuk berperan sebanyak mungkin dalam pembangunan di wilayah mereka. Pendekatan ini memastikan penerapan prinsip-prinsip demokrasi melalui akses masyarakat dalam berpartisipasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji aspek demokratisasi komunitas pada pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh, digunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari segi metodologi, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman subyektif yang dialami oleh sejumlah aktor informan yang secara signifikan terlibat dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan. Teknik penyeleksian informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam konteks normatif, sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Secara praktis, Bogdan dan Taylor (1992) memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan fenomenologi, yang melibatkan tiga tahap utama, yakni: (1) tahap pra-lapangan, (2) tahap di lapangan, dan (3) tahap analisis data. Analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pembagian menjadi unit-unit, sintesis,

penyusunan pola, hingga pembuatan kesimpulan (Moleong, 1989).

C. HASIL PENELITIAN

Implementasi Program PNPM Mandiri Perkotaan yang bertumpu pada demokratisasi komunitas dapat diukur melalui pencapaian sejumlah indikator berikut:

1. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Kesempatan yang Sama untuk Berpartisipasi

Demokratisasi komunitas adalah usaha untuk membawa prinsip-prinsip demokrasi ke dalam lingkungan komunitas, memastikan kesetaraan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Fokusnya adalah menciptakan kesetaraan, inklusivitas, dan keterlibatan aktif semua anggota dalam berbagai aspek kehidupan komunitas. Memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi adalah aspek penting dalam mencapai demokratisasi komunitas, di mana setiap individu harus memiliki hak yang setara untuk berkontribusi, tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, atau latar belakang sosial. Kesempatan yang sama menciptakan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan mewakili kebutuhan serta aspirasi seluruh anggota komunitas.

Program secara prosedural dan konsisten membangun mekanisme untuk menjamin akses dan layanan bagi warga untuk berpartisipasi. Prinsip inklusi, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi adalah suprastruktur yang mendorong semua kalangan secara lintas kalangan untuk menunjukkan partisipasinya dalam berbagai bentuknya. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada berbagai peran yang ditunjukkan masyarakat, mulai dari proses perencanaan dan persiapan hingga pada pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil program. Partisipasi telah menjadi corak khas pada pembangunan alternatif yang memosisikan masyarakat sebagai subyek utama dalam pelaksanaan

pembangunan.

2. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Transparansi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengelolaan Anggaran

Demokratisasi komunitas membawa prinsip-prinsip demokrasi ke dalam lingkungan komunitas, khususnya dalam hal transparansi dalam pengambilan keputusan. Transparansi ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan proses pengambilan keputusan terbuka dan mudah diakses oleh seluruh anggota komunitas. Informasi tentang bagaimana keputusan dibuat harus tersedia untuk semua anggota, termasuk data, dokumentasi, pertemuan terbuka, dan komunikasi jelas tentang perkembangan kebijakan. Transparansi membangun kepercayaan di antara anggota komunitas, memastikan integritas keputusan, dan mendorong pertanggungjawaban. Salah satu aspek yang dituntut ditransparasikan adalah anggaran sebagai komponen program paling vital. Pengelolaan anggaran program secara mandiri telah secara langsung menyebabkan terjadinya wilayah korupsi, yakni dari struktur atau birokrasi bergeser ke masyarakat. Untuk mencegah praktik birokrasi di level masyarakat sebagai pemanfaat primer program, maka program membangun mekanisme standar yang memungkinkan potensi birokrasi dapat diperkecil.

Dalam praktiknya, transparansi dalam pengambilan keputusan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas. Hal ini memungkinkan diskusi terbuka dan berkelanjutan yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih mendukung bagi semua pihak. Mekanisme pentransparansian dilakukan dengan melakukan dengan berbagai cara, antara lain; sosialisasi hasil keputusan yang diambil secara representatif melalui berbagai media, khususnya media dengan platform digital. Pelaporan keuangan secara periodik kepada lembaga atau organisasi lokal dan

pemerintah kelurahan/desa, publikasi penggunaan dana di beberapa tempat strategis, dan audit independen pengelolaan keuangan oleh akuntan/auditor independen.

3. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Pemilihan Pemimpin Masyarakat secara Inklusif dan Representatif

Pemilihan pemimpin masyarakat secara inklusif dan representatif adalah aspek demokratisasi komunitas yang menekankan bahwa proses ini harus adil dan mencerminkan keragaman serta kepentingan dalam komunitas. Proses pemilihan harus mengakomodasi berbagai kebutuhan, termasuk aksesibilitas dan pemberian informasi dalam berbagai bahasa. Representativitas pemimpin yang terpilih menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh komunitas merasa diwakili dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Demokratisasi komunitas mensyaratkan adanya institusi lokal yang juga berkarakter sebagai pranata sosial, yang menurut Soetomo (2011) bahwa keberadaan institusi lokal merupakan instrumen terpenting dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pembentukan institusi lokal juga mensyaratkan terpilihnya pemimpin masyarakat yang akan mengisi institusi dan pranata sosial tersebut berdasarkan kriteria yang disepakati warga sebagai pemilik institusi. Institusi lokal atau organisasi lokal disebut Suhaimi (2016) sebagai perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak, yang berperan sebagai sarana partisipasi.

Aspek pemilihan pemimpin masyarakat adalah tentang memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin dilakukan secara inklusif dan representatif, sehingga seluruh anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam upaya untuk mencapai demokratisasi komunitas yang sejati, sangat penting untuk memperhatikan

cara pemimpin komunitas dipilih.

4. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia

Demokratisasi komunitas dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Komunitas harus mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan membentuk budaya yang menghormati hak-hak tersebut. Pembentukan mekanisme dan lembaga yang melindungi hak asasi manusia juga menjadi bagian integral dari demokratisasi komunitas.

Dalam konteks demokratisasi komunitas, pengakuan terhadap hak asasi manusia berarti bahwa komunitas tidak hanya harus mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga harus membentuk budaya yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak tersebut. Ini mencakup pemahaman bersama tentang pentingnya hak asasi manusia dan komitmen untuk menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan di dalam komunitas. Ife (2008) secara gamblang menyebut hak asasi manusia sebagai sebuah komponen vital dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Menurutnya bahwa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat harus mampu menegaskan hak asasi manusia, memungkinkan setiap orang mewujudkan dan melaksanakan hak asasi mereka, dan melindunginya dari pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi selama proses keterlibatannya dalam sebuah program.

5. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Penguatan Kapasitas Masyarakat

Penguatan kapasitas masyarakat adalah upaya dalam demokratisasi komunitas untuk memberdayakan anggota komunitas dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan. Ini memungkinkan mereka

berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan komunitas. Penguatan kapasitas melibatkan pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Penguatan kapasitas masyarakat melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya. Ini mencakup memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam demokrasi, pengetahuan tentang isu-isu kunci yang memengaruhi komunitas, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya memfasilitasi akses ke sumber daya seperti pendanaan, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat juga mendukung tumbuhnya kemandirian. Ini membantu dalam mengembangkan kepemimpinan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan demikian, komunitas yang kuat dan berdaya akan lebih mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bersama.

Proses penguatan kapasitas berjalan dengan mekanisme sebagai berikut: a) Membangun kesadaran kolektif warga tentang pentingnya bergerak dengan paradigma yang lebih maju bahwa “persoalan yang ada adalah persoalan bersama sehingga harus ditanggulangi secara bersama-sama pula. b) Mengedukasi masyarakat melalui pemberian akses yang mudah untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang program. c) Menyelenggarakan paket-paket pelatihan bagi semua pelaku program di semua tingkatan pemerintahan (kelurahan hingga kabupaten) agar memiliki pemahaman substansi yang sama serta mampu secara teknis memfasilitasi pelaksanaan program. d) Melakukan “coaching clinic” bagi semua

pelaku program secara periodik untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan tugas-tugas teknisnya sebagaimana posisi yang diembannya.

Dalam keseluruhan konteks demokratisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat adalah kunci untuk menciptakan komunitas yang demokratis, inklusif, dan berdaya. Ini membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas, pengambilan keputusan yang lebih adil, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan di seluruh komunitas.

6. Demokratisasi Komunitas pada Aspek Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan sosial dan ekonomi dalam demokratisasi komunitas adalah usaha untuk menciptakan lingkungan komunitas yang adil, di mana kesempatan dan manfaat didistribusikan secara merata. Keadilan sosial mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, termasuk upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses yang sama. Keadilan ekonomi melibatkan distribusi yang adil dari kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi.

Dengan demikian, demokratisasi komunitas yang efektif mencakup langkah-langkah konkret dalam aspek-aspek tersebut, menciptakan komunitas yang lebih inklusif, adil, dan berdaya.

D. KESIMPULAN

Implementasi Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Lakessi berjalan lancar dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas. Sebagai penerima utama manfaat, masyarakat memiliki akses dan peluang yang seimbang untuk terlibat dalam program ini. Peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat telah berhasil menjadi pendorong dan penengah yang memastikan program dilaksanakan secara inklusif dan demokratis. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan berbagai pihak terkait

pembangunan lokal turut berkontribusi pada kesuksesan program, terlihat dari pencapaian indikator penerapan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas. Ini mencakup aspek kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin masyarakat secara inklusif dan representatif, pengakuan terhadap hak asasi manusia, penguatan kapasitas masyarakat, dan keadilan sosial serta ekonomi. Meskipun tingkat kinerja bervariasi dalam aspek-aspek utama demokratisasi komunitas, namun implementasinya secara umum telah terurai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahua, Muhammad Iqbal. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Ideas Pbulisihing, Gorontalo.
- Friedman, John. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Gaventa, John. (1980). *Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley*. University of Illinois Press.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi Ketiga (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid; alih bahasa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. CIDES, Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Jaya.
- Patton, Michael Quinn. (1978). *Utilization-*

- Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Priyono, Onny S. & Pranarka, A.M.W. (Penyunting). (1999). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Putnam, Robert. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew. [e-book].
- Sipahelut, Michel. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis*. IPB. Bogor.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
-, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyanto, Mudiyo AY. Oelin Marliyantoro. (2017). *Dimensi-dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press, Yogyakarta,.
- Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. UNDIP. Semarang.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Lappera Pustaka Utama dan STPN Press. Yogyakarta.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.
- Suhaimi, Ahmad. (2016). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa*. Yogyakarta:

Deepublish.